

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**TAHUN 2016**

**I. PENDAHULUAN**

**A. GAMBARAN UMUM**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menurut Perda tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut telah disusun Rencana Strategis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian serta reformasi birokrasi.

**B. TUPOKSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,
- b) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian,
- c) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

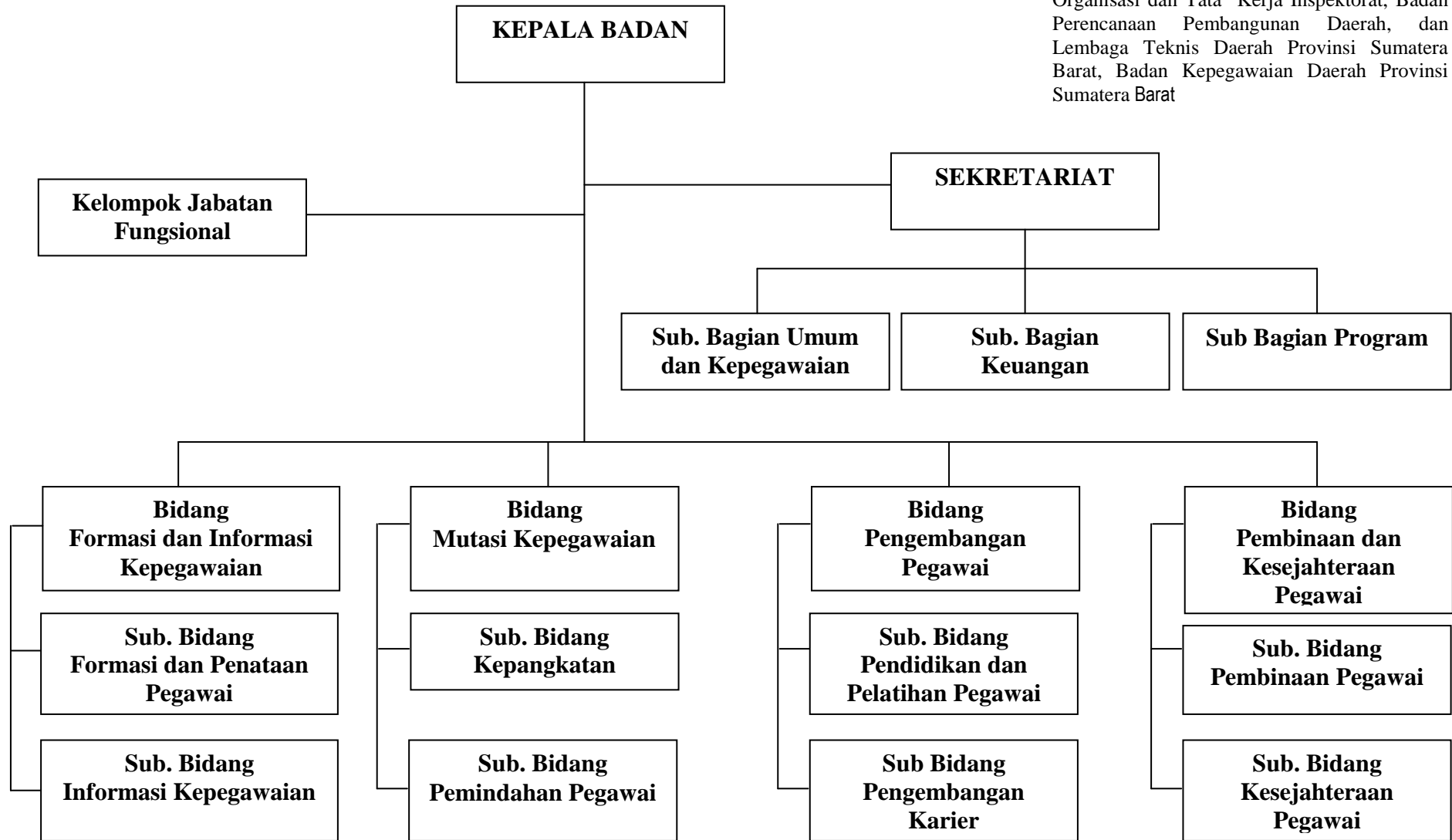
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 diatas, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

- 1. Kepala Badan,
- 2. Sekretariat terdiri dari;
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Program
- 3. Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari;
  - a) Sub Bidang Formasi dan Penataan Pegawai
  - b) Sub Bidang Informasi Kepegawaian
- 4. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari;
  - a) Sub Bidang Kepangkatan
  - b) Sub Bidang Pemindahan Pegawai
- 5. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari;
  - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
  - b) Sub Bidang Pengembangan Karier
- 6. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari;
  - a) Sub Bidang Pembinaan Pegawai
  - b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah bagan struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari kepala hingga sub bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan:

**Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**

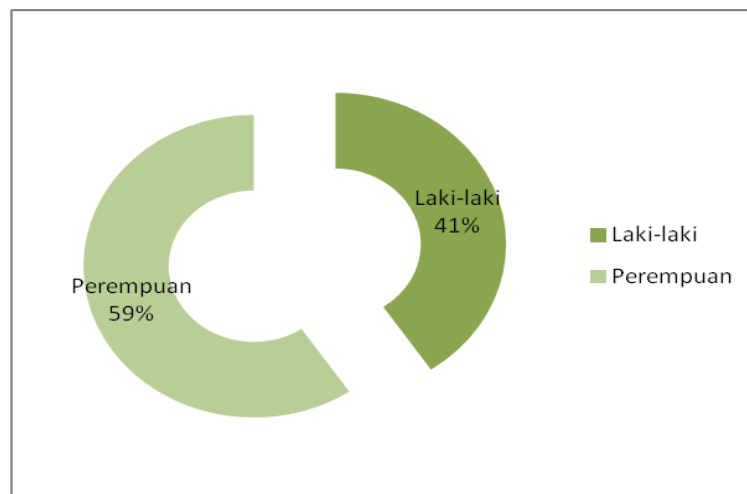
Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 10 Tahun 2014  
 Tentang : Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat



### C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi BKD yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 74 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 44 orang (59,46%) perempuan dan 30 orang (40,54%) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 18,92 persen, namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

**Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber : Subag Umum dan Kepeg. BKD Provinsi Sumatera Barat*

Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

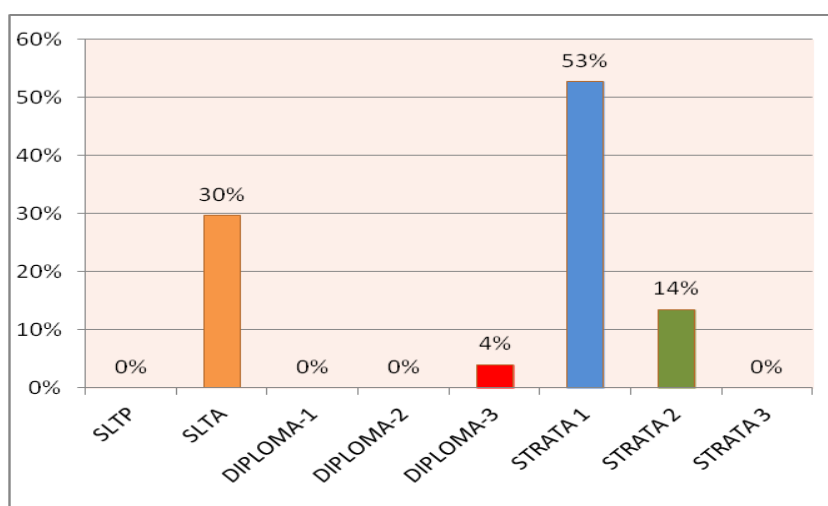
**Tabel 1.1. DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BKD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	0	0%
2	SLTA	22	30%
3	DIPLOMA III/ D-3	3	4%
4	STRATA 1	39	53%
5	STRATA 2	10	14%
6	STRATA 3	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>74</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian BKD Prop. Sumbar.*

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas BKD karena lebih dari 53% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 30% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

**Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



Sumber : BKD Prov. Sumatera Barat

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

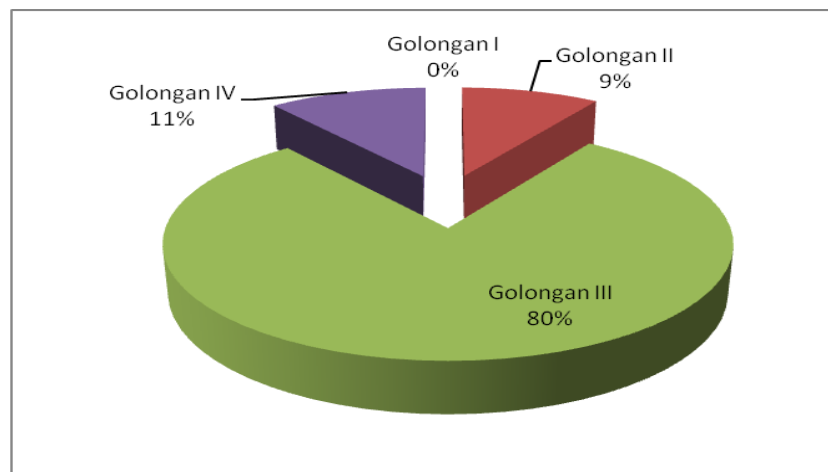
**Tabel 1.2. DAFTAR GOLONGAN PEGAWAI BKD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	7	9%
3	Golongan III	59	80%
4	Golongan IV	8	11%
	<b>JUMLAH</b>	<b>74</b>	100,00%

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian BKD Prop. Sumbar.

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 80% pegawai BKD adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS BKD per golongan:

**Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber : BKD Prov. Sumatera Barat*

#### **D. Anggaran**

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 14.284.340.885,- (Perubahan anggaran) yang terdiri dari :

**a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.750.713.885,-**

- Gaji dan Tunjangan : Rp. 5.122.590.885,-
- Tambahan Penghasilan PNS : Rp. 1.628.123.000,-

**b. Belanja Langsung : Rp. 7.533.627.000,-**

Terdiri dari:

Belanja langsung pokok 5 Program, 30 kegiatan.

Belanja langsung urusan 1 Program, 26 kegiatan.

## E. Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah. Nilai aset yang dikelola BKD per Desember 2016 sebesar Rp. 9.722.092.540,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 9.388.266.040,- dan aset lainnya sebesar Rp. 333.826.500,- Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2016 sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Daftar Aset BKD Provinsi Sumatera Barat  
Per Desember 2016**

No	Jenis Barang	Jumlah
<b>I.</b>	<b>ASET TETAP</b>	
1	Golongan Tanah Tanah	352 M <sup>2</sup>
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi	5 unit 4 unit 1.051 unit 28 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	1.479 M <sup>2</sup>
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	226 Buah 33 Unit
<b>II.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	
1	Aset tidak berwujud	6 Sistim Aplikasi
2	Aset tidak bermanfaat	6 unit

*Sumber : Kartu Inventaris Barang BKD Prov. Sumbar*

## F. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Sarana dan prasarana gedung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang mutasi kepegawaian, ruangan informasi dan formasi kepegawaian, ruangan pengembangan pegawai, ruangan pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Selain itu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan tata naskah yang dipergunakan untuk menyimpan arsip pegawai, ruangan rapat, aula dan lain sebagainya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah:

**Tabel 1.4. Daftar Kendaraan Dinas  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

<b>No</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Merk</b>	<b>Dipergunakan Untuk</b>
1	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Caraka
2	Sepeda Motor	Honda Blade	Operasional Administrasi
3	Mobil	Kijang Innova	Operasional Kepala Badan
4	Mobil	Kijang Innova	Operasional Administrasi
5	Mobil	Toyota Avanza	Operasional Administrasi

*Sumber : Data asset BKD BKD Tahun 2016*

## **G. Informasi Pelayanan**

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **1. Pelayanan Formasi dan Informasi kepegawaian.**

Pelayanan Formasi dan Pengadaan meliputi pelayanan formasi pegawai, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penetapan CPNSD menjadi PNSD, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk pihak ketiga, pelayanan penerbitan Karpeg Pegawai Negeri Sipil, pelayanan penerbitan



Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil. Adapun perkembangan kegiatan pada pelayanan formasi dan Informasi kepegawaian dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5. Pelayanan Formasi dan Pengadaan  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pengadaan CPNSD	-	145	180	-	-

*Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2012-2016*

2. Pelayanan Mutasi Kepegawaian.

Pelayanan Mutasi kepegawaian meliputi pelayanan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, pelayanan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil. Untuk melihat perkembangan dari pelayanan mutasi dan kepangkatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012-2016 sebagai berikut:

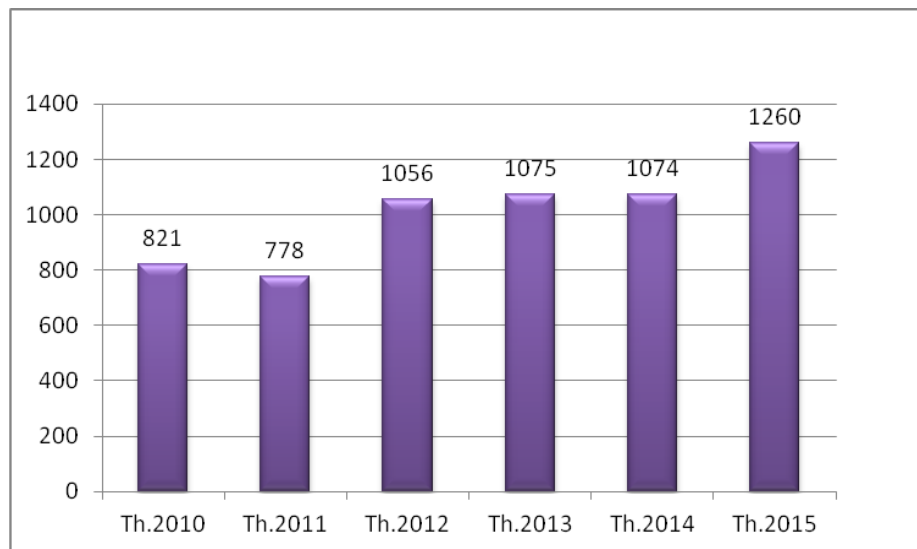
**Tabel 1.6 Pelayanan Mutasi dan Kepangkatan  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kenaikan Pangkat	4191	3031	3105	2440	2870
2	Mutasi Pindah	1056	1075	1074	1260	829
3	Pensiun	380	414	222	162	511

*Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2012-2016*

Berdasarkan data dari bidang mutasi dan kepangkatan, setiap tahunnya terdapat 1000 perpindahan yang ditargetkan, namun dalam realisasinya terjadi diatas target dan di bawah target yang ditetapkan. Dari tahun 2012 sampai dengan 2016, angka yang terjadi tidak terlalu signifikan.

**Gambar 1.5. Jumlah Pelayanan Mutasi Pindah PNS  
Tahun 2010-2016 Pada BKD  
Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber : Bidang Mutasi dan Kepangkatan, 2016*

3. Pelayanan Pengembangan Pegawai.

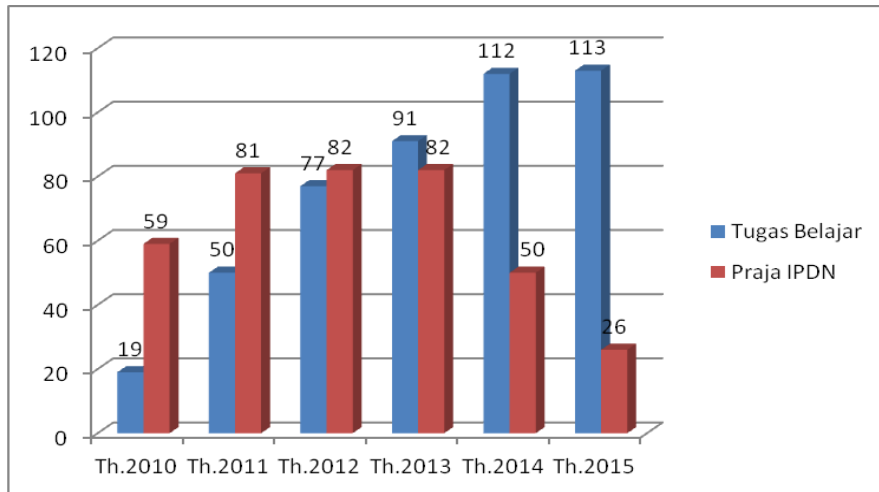
Pelayanan Pengembangan Pegawai meliputi pelayanan penugasan Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan dan pelatihan, pelayanan penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan. Kegiatan pelayanan data dan pengembangan Pegawai pada tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.7. Pelayanan Data dan Pengembangan Pegawai  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tugas Belajar	50	77	91	112	113	65
2	Praja IPDN	81	82	82	50	26	30

*Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2011-2016*

**Gambar 1.6. Jumlah Penerimaan Praja IPDN dan PNS Tugas Belajar Tahun 2010-2015 Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



Sumber : Bidang Data dan Pengembangan BKD Prov.Sumbar

4. Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

Pelayanan Disiplin dan Pembinaan meliputi pelayanan pemberian hukuman disiplin PNS, pelayanan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan pelayanan pembekalan PNS purna tugas. Pemberian penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya kepada PNS merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pelayanan disiplin dan pembinaan. Berikut adalah pelayanan disiplin dan pembinaan pada tahun 2011-2015 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat:

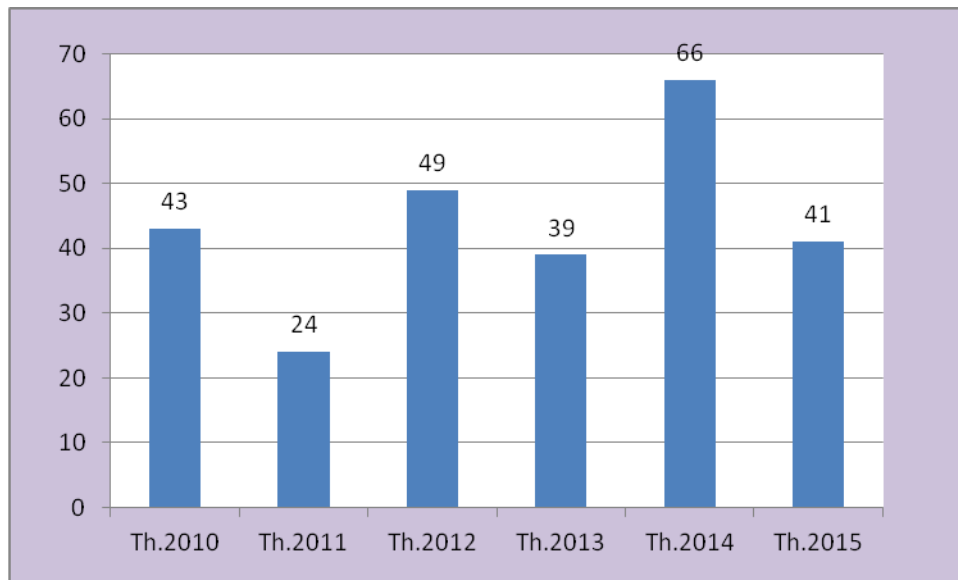
**Tabel 1.8. Pelayanan Disiplin dan Pembinaan BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Hukuman Disiplin PNS	24	49	39	66	41	50
2	Penghargaan PNS prestasi	12	12	4	4	4	4
3	Pembekalan PNS Purna Tugas	25	25	25	25	30	25
4	Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	273	410	708	312	357	399

Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2011-2016

Pelayanan hukuman disiplin PNS mengalami kenaikan yaitu angka 50 kasus pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 41 kasus yang ditangani pada bidang disiplin dan pembinaan pada BKD Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 1.7. Jumlah Pelayanan Hukuman Disiplin PNS  
Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber : Bidang Pembinaan dan Kespeg, 2016*

## **II. DOKUMEN PERENCANAAN**

### **A. RENSTRA**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 dibunyikan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kepala SKPD, dalam hal ini Kepala BKD menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Dan selanjutnya Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sekaligus memberikan motivasi, pengembangan inisiatif, dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah.
- b. Memberi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai visi dari pelaksanaan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
- d. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- e. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada BKD dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- f. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan & penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- g. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- h. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada BKD.

### **Visi**

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan daerah dibidang kepegawaian, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai supaya tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui perumusan, masukan, saran, aspirasi dan inspirasi seluruh bidang-bidang, disusun rumusan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rumusan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah selama kurun waktu 2016-2021 adalah:

### **“ MENJADI PENGELOLA MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG PROFESIONAL”**

Makna pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah:

- a. Pengelola adalah orang yang mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya;
- b. Manajemen kepegawaian adalah proses tertentu dibidang kepegawaian yang mencakup kegiatan-kegiatan penerimaan, penempatan, penggajian,

promosi, penilaian kinerja, dan pemberhentian pegawai di lingkungan instansi pemerintah;

- c. Profesional adalah memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sesuai dengan substansi dan kompetensi bidang tugas serta perilaku yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi diatas merupakan kebutuhan bagi SKPD Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan SKPD penunjang dan juga dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan bagi publik. Pada saat sekarang permasalahan tatanan pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan instansi dengan mengembangkan seluruh potensi pembangunan di daerah.

### **Misi**

Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah negara.

Selaras dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Meningkatkan aparatur pemerintah yang profesional dan berdisiplin ;
- b. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi dan misi Renstra BKD sudah mendukung visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yakni pada misi kedua "Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional".

## B. RENJA TAHUNAN

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-bidang dan Sekretariat Badan.

Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut kepegawaian sesuai kewenangan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, Tahun 2016 program yang akan dilaksanakan oleh BKD adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (15 Kegiatan)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (10 Kegiatan)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur (1 Kegiatan)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (3 Kegiatan)
6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur (26 Kegiatan)

Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan BKD Tahun 2016 adalah :

<b>NO.</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>JUMLAH DANA (Rp.)</b>	<b>KET.</b>
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.810.912.000,-	15 kegiatan
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	868.228.000,-	11 kegiatan
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	52.920.000,-	1 kegiatan
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64.800.000,-	1 kegiatan

V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	244.100.000,-	3 kegiatan
VI.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	6.620.307.000,-	32 kegiatan
<b>JUMLAH</b>		<b>9.661.267.000,-</b>	<b>62 kegiatan</b>

Sumber : Renja BKD Tahun 2016

### III. DATA KINERJA DAN KEUANGAN

#### DATA KINERJA SKPD

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 14.284.340.885,- yang terdiri dari :

**a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.750.713.885,-**

- Gaji dan Tunjangan : Rp. 5.122.590.885,-
- Tambahan Penghasilan PNS : Rp. 1.628.123.000,-

**b. Belanja Langsung : Rp. 7.533.627.000,-**

Terdiri dari : 6 Program dan 56 Kegiatan.

Program yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Jumlah dana yang disediakan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)
---------------	----------------------



1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.903.598.800,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.057.739.500,-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.081.000,-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.850.000,-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	335.325.000,-
6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	3.170.032.700,-
<b>Total</b>		<b>7.533.627.000,-</b>

### KEGIATAN TAHUN 2016

Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN		JUMLAH DANA (Rp.)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.903.598.800,-</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	32.115.000,-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	343.468.000,-
3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.750.000,-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	130.000.000,-
5	Penyediaan alat tulis kantor	55.559.300,-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72.483.000,-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.623.500,-
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.105.923.000,-
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.926.000,-
10	Penyediaan makanan dan minuman	30.400.000,-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	809.507.000,-
12	Penyediaan jasa Sopir Kantor	77.232.000,-
13	Penyediaan jasa pengaman kantor	179.712.000,-
14	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	16.500.000,-
15	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	16.400.000,-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.057.739.500,-</b>

1	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	422.900.000,-
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46.000.000,-
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	28.600.000,-
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12.250.000,-
6	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	30.250.000,-
7	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi Jaringan	26.000.000,-
8	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Aset SKPD	63.582.000,-
9	Penataan dan Pengelolaan Arsip	14.084.000,-
10	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	374.073.500,-
<b>III Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>42.081.000,-</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	42.081.000,-
<b>IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>24.850.000,-</b>
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	24.850.000,-
<b>V Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>		<b>335.325.000,-</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	29.512.000,-
2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	41.988.000,-
3	Penatausahaan Keuangan SKPD	263.825.000,-
<b>VI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		<b>3.170.032.700,-</b>
1	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS	333.871.950,-
2	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS	71.338.600,-
3	Pengelolaan mutasi jabatan	175.257.100,-
4	Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN	282.653.250,-
5	Pemindahan dan penempatan PNS	64.899.000,-
6	Pembinaan Jabatan Fungsional PNS	33.100.000,-
7	Pemetaan Potensi Pegawai	160.703.400,-
8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	254.120.500,-
9	Penilaian Kinerja Aparatur	120.238.250,-
10	Bimbingan Teknis Kepegawaian	72.629.750,-
11	Ujian Dinas Tingkat I dan Tk.II	19.380.000,-
12	Seleksi ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS	96.964.300,-
13	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas	64.527.500,-
14	Pemberian tanda kehormatan satyaencana karya satya	61.333.000,-
15	Pengelolaan dan pemberian bantuan pendidikan aparatur	523.884.000,-

16	Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	97.616.000,-
17	Penataan dan Pengelolaan Dokumen/Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	68.939.750,-
18	Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai	44.580.000,-
19	Pengelolaan SK CPNS, PNS dan Honorer Pemprov. Sumatera Barat	54.320.000,-
20	Pengelolaan tata naskah dan Pemutakhiran Database kepegawaian daerah	145.341.000,-
21	Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov. Sumbar	85.637.000,-
22	Rapat Koordinasi Kepegawaian	70.791.350,-
23	Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS	29.850.000,-
24	Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)	42.521.000,-
25	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja	41.923.000,-
26	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG)	153.613.000,-

## **REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

### **A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 2.903.598.800,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 2.728.037.898,- atau 98,12%.

Kelebihan Dana pada program ini sebagian besar pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam rangka efisiensi anggaran.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

#### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Keluaran:

terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib pelayanan administrasi perkantoran.

## **2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Keluaran:

terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet, SIPKD dan SAPK yang online selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan listrik, air, telepon dan internet.

## **3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan**

Keluaran:

tersedianya tabung pemadam kebakaran pada kantor Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan adalah dalam rangka penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran.

## **4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Keluaran :

Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk 1 tahun, dengan capaian kinerja adalah 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor.

## **5. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Keluaran :

Tersedianya ATK kantor selama 1 tahun, dengan capaian 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Keluaran :

Tersedianya barang-barang cetakan seperti kertas kop, map, amplop, dan lain-lain, serta tersedianya biaya penggandaan selama 1 tahun, dengan capaian 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah tertunjangnya pelayanan administrasi perkantoran.

## **7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Keluaran :

tersedianya alat-alat dan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah tertunjangnya kegiatan pada BKD.

## **8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini adalah 15 unit rool peg, 2 unit mesin penghancur kertas, 14 unit AC, 2 unit vacuum cleaner, 5 unit tabung pemadam kebakaran, 1 unit TV, bendera dan spanduk yang akan meningkatkan kenyamanan kerja PNS BKD, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Meningkatnya kenyamanan kerja PNS BKD.

## **9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Keluaran :

tersedianya biaya untuk langganan surat kabar selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur.

## **10. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Keluaran :

tersedianya biaya makan minum untuk penyelenggaraan rapat selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan manajemen kepegawaian.

## **11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah**

Keluaran :

Tersedianya anggaran untuk perjalanan kedinasan selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil Dari kegiatan ini dalam rangka peningkatan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

#### **12. Penyediaan Jasa Sopir**

Keluaran :

Tersedianya jasa tenaga sopir kantor BKD selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

#### **13. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor**

Keluaran :

Tersedianya tenaga pengaman kantor BKD selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

#### **14. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi**

Keluaran :

Tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi 1 tahun.

Hasil :

Informasi yang disajikan di media cetak untuk masyarakat.

#### **15. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur**

Keluaran :

Terlaksananya wirid pengajian dan senam di kantor BKD selama 1 tahun.

Hasil :

Terbinanya mental dan fisik aparatur.

### **B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 1.057.739.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 901.803.615,- atau capaian keuangan sebesar 85,26%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pada BKD, dengan capaian fisik 100%.

#### **1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Keluaran:

Dari kegiatan ini diperoleh 4 unit PC, 3 unit laptop, 7 unit printer, 2 unit scanner dan 2 unit server yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya kinerja dan pelayanan BKD.

## **2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Keluaran:

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kenyamanan dan produktivitas kerja PNS di lingkungan BKD.

## **3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Keluaran:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas (3 unit mobil dan 2 unit motor) selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas.

## **4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Keluaran:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

## **5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelieer**

Keluaran:

Terpeliharanya meja, kursi dan mebel kantor lainnya selama 1 tahun, dengan capaian 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan meubelieer kantor.

## **6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Keluaran:

Terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sehingga mewujudkan kinerja yang baik.

**7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan**

Keluaran:

Terpeliharanya instalasi dan jaringan selama 1 tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pemeliharaan instalasi dan jaringan.

**8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD**

Keluaran:

Tersusunnya pelaporan asset SKPD selama 1 tahun, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil:

Terwujudnya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD.

**9. Penataan dan Pengelolaan Arsip**

Keluaran:

Tersedianya kelengkapan kearsipan SKPD selama 1 tahun. Dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya penataan dan pengelolaan arsip yang tertib pada SKPD.

**10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor**

Keluaran:

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya kenyamanan bekerja di Lingkungan BKD.

**C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

**1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Keluaran:

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk PNS BKD, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:



Meningkatnya kinerja aparatur BKD.

#### **D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

##### **1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Keluaran:

Terlaksananya pengiriman PNS pada Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Bintek Kepegawaian ke BKN, Kemendagri, dan pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi PNS BKD selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya professional PNS di bidangnya.

#### **E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

##### **1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Keluaran:

Outputnya adalah laporan terkait akuntabilitas kinerja, seperti perjanjian kinerja, bahan LKPJ Gubernur, LPPD, Laporan Kinerja dan lain sebagainya dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini meningkatnya kinerja SKPD BKD.

##### **2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/ Kegiatan SKPD**

Keluaran:

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran pada BKD seperti Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA dan DPPA, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

##### **3. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Keluaran:

Tersedianya laporan keuangan tahunan dan bulanan dan honorarium pengelola kegiatan dan keuangan (KPA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara), dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya pengelolaan keuangan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**

### **1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS**

Keluaran:

Terlaksananya kenaikan pangkat PNS yang dikelola sebanyak 2870 SK dengan tingkat capaian kinerja sebesar 114,80%.

Hasil:

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan kenaikan pangkat PNS.

### **2. Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS**

Keluaran:

Terlaksananya pengelolaan pensiun sebanyak 375 Surat Keputusan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,75 %.

Hasil:

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah diterbitkannya SK pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian.

### **3. Pengelolaan Mutasi Jabatan**

Keluaran:

Terlaksananya pengisian jabatan dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Hasil:

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengisian jabatan sesuai kompetensi.

### **4. Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN**

Keluaran:

Dari 1232 orang yang mengikuti seleksi awal (target 1100 orang) dapat dikirim sebanyak 30 orang untuk mengikuti pendidikan Praja IPDN.

Hasil:

Terwujudnya Seleksi Calon Praja IPDN.

### **5. Pemindahan dan Penempatan PNS**

Keluaran:

Terlaksananya pemindahan dan penempatan PNS dengan realisasi 829 orang dengan tingkat capaian kinerja 82,90%.

Hasil:

Terwujudnya pengelolaan pemindahan dan penempatan PNS sesuai ketentuan berlaku.

## **6. Pembinaan Jabatan Fungsional PNS**

Keluaran:

Terlaksananya penetapan angka kredit yang akurat direncanakan sebanyak 400 orang, dan dapat direalisasi sebanyak 400 orang dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terlaksananya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, pemberhentian/pemberhentian sementara PNS dalam jabatan fungsional kenaikan pangkat/jabatan PNS sesuai dengan angka kredit kenaikan jabatan dan dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **8. Pemetaan Potensi Pegawai**

Keluaran:

Terlaksananya pemetaan potensi dengan realisasi 230 PNS, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai potensi pegawai melalui pemetaan potensi.

## **9. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi**

Keluaran:

Terlaksananya pemberian penghargaan untuk 4 orang PNS, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatkan motivasi kerja sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian serta dapat menjadi contoh bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

## **10. Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS**

Keluaran:

Terlaksananya penilaian kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target 1000 orang, realisasinya 1129 orang, maka capaian kinerja adalah 112,90%.

Hasil:

Terwujudnya peningkatan kinerja PNS dan capaian tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara maksimal serta peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **11. Bimbingan Teknis Kepegawaian**

Keluaran:

Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepegawaian dengan materi adalah Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional terhadap 100 orang PNS Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### **12. Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II PNS**

Keluaran:

Terlaksananya Ujian Dinas Tk.1 sebanyak 50 orang dan lulus 41 orang sedangkan yang mengikuti Ujian Dinas Tk.II sebanyak 12 orang dan lulus 12 orang, jadi dari 40 PNS yang ditargetkan lulus Ujian Dinas adalah 53 orang dengan tingkat capaian kinerja 132,50%.

Hasil:

Meningkatnya kinerja PNS.

#### **13. Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS**

Keluaran:

Terlaksananya Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tahun 2016 sebanyak 159 orang dari 80 orang yang ditargetkan (capaian kinerja 198,75%). Namun yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 115 orang.

Hasil:

Terpenuhinya persyaratan-persyaratan terhadap PNS untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **14. Pembekalan PNS Purna Tugas**

Keluaran:

Terlaksananya pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun (purna tugas) sebanyak 25 orang.

Hasil:

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS yang akan memasuki purna tugas sebanyak 25 orang, dengan capaian kinerja 100%.

### **15. Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya**

Keluaran:

Terlaksananya penyerahan tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 399 orang (target 300 orang), capaian kinerja sebesar 133%.

Hasil:

Meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

### **16. Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur**

Keluaran:

Target PNS yang mengikuti pendidikan tahun 2016 adalah 17 orang, realisasi 17 orang (lanjutan APBD dan cost sharing), dengan capaian kinerja 100%

Hasil:

Meningkatnya kompetensi PNS melalui pendidikan lanjutan.

### **17. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS**

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS. Dari 6 kali sidang MPP yang telah dilaksanakan dihasilkan jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 50 orang (ringan 14 orang, sedang 16 orang, berat 20 orang), izin perceraian 19 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil:

kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku melalui Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP).

### **18. Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian**

Keluaran:

Tersedianya aturan bidang kepegawaian yang jelas sebagai pedoman menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya aturan yang jelas dan tepat tentang kepegawaian.

### **19. Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai**

Keluaran:

Terfasilitasinya pembuatan kartu identitas pegawai yaitu berupa Karpeg 406 PNS, Karis 170 PNS, Karsu 42 PNS, SK Konversi NIP 13 PNS dan KPE 11 PNS yang

lengkap dan akurat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian kinerja 160,50%.

Hasil:

Meningkatkan pelayanan kepada PNS.

## **20. Pengelolaan SK CPNS, PNS dan Honorer Pemprov. Sumatera Barat**

Keluaran:

Tersedianya SK PNS dan Tenaga Honorer Provinsi Sumatera Barat dengan target 234 SK, realisasi SK PNS 170 SK, dan tenaga honorer 85 SK dengan demikian capaian kerjanya adalah 108,97%.

Hasil:

Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik.

## **21. Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Base kepegawaian daerah**

Keluaran:

Terkelolanya tata naskah Kepegawaian sebanyak 8000 file (target 8000 file, dengan capaian kinerja 100%) PNS di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Hasil:

Mewujudkan kelancaran dan efektivitas kegiatan administrasi perkantoran dalam suatu organisasi pemerintah baik.

## **22. Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov. Sumbar**

Keluaran:

Tersedianya buku formasi SKPD, dengan capaian 100%

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini menyediakan informasi kebutuhan pegawai yang akurat.

## **23. Rapat Koordinasi Kepegawaian**

Keluaran:

Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Kota Sawahlunto dengan peserta Rakor ini adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian kabupaten/kota dan SKPD Provinsi sebanyak 100 orang.

Hasil:

Mewujudkan persamaan persepsi antara Pengelola Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

#### **24. Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS**

Keluaran:

Terlaksananya koordinasi/pembinaan pada 19 kabupaten/kota.

Hasil:

Terwujudnya penetapan kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu.

#### **25. Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)**

Keluaran:

Terlaksananya Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) bagi aparatur di lingkungan Pemprov Sumbar sebanyak 25 orang, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatkan potensi diri dengan adanya motivasi dorongan yang kuat dalam diri PNS dalam bekerja.

#### **26. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja**

Keluaran:

Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja di lingkungan Pemprov Sumbar dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Hasil:

Sebagai bahan evaluasi kinerja PNS pada unit dan organisasi dan sebagai pedoman bagi setiap PNS, pejabat penilai dan pejabat lain yang berkepentingan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja untuk kemajuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **27. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG)**

Keluaran:

Tersedianya modul/pengembangan sistem informasi pelayanan kepegawaian SKPD yang online dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya data dan profil PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk pengelolaan SDM aparatur dalam upaya memberikan pelayanan publik yang optimal.

## **DATA KINERJA KEUANGAN**

### **A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

#### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 32.115.000,- dan terealisasi sebesar Rp 29.526.710,- atau capaian kinerja keuangan 91,94%.

#### **2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 343.486.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 302.414.551,- atau capaian kinerja keuangan 88,05%.

#### **3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan sebesar Rp. 2.750.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 2.750.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

#### **4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 130.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 128.609.600,- atau capaian kinerja keuangan 98,93%.

#### **5. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 55.559.300,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 55.557.300,- atau capaian kinerja keuangan 99,99%.

#### **6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 72.483.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 70.260.100,- atau capaian kinerja keuangan 96,93%.

#### **7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 9.623.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 9.622.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,99%.

#### **8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 1.105.923.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.073.790.000,- atau capaian kinerja keuangan 97,09%.



### **9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 21.926.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 19.495.000,- atau capaian kinerja keuangan 88,91%.

### **10. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 30.400.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 24.780.000,- atau capaian kinerja keuangan 81,51%.

### **11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah sebesar Rp. 809.507.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 738.059.037,- atau capaian kinerja keuangan 91,17%.

### **12. Penyediaan Jasa Sopir**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Sopir sebesar Rp. 77.232.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 72.385.600,- atau capaian kinerja keuangan 93,72%.

### **13. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor sebesar Rp. 179.712.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 175.687.500,- atau capaian kinerja keuangan 97,76%.

### **14. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sebesar Rp. 16.500.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 13.000.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 78,79%.

### **15. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp. 16.400.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 12.100.000,- atau capaian kinerja keuangan 73,78%.

## **II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 1.057.739.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 901.803.615,- atau capaian keuangan sebesar 85,26%.

**1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar Rp. 422.900.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 352.553.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 83,37%.

**2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 40.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 39.841.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,60%.

**3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 46.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 31.655.615,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 68,82%.

**4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 28.600.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 23.777.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 83,14%.

**5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelir**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler sebesar Rp. 12.250.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 12.250.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

**6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar Rp. 30.250.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 29.660.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 98,05%.

**7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan sebesar Rp. 26.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 25.530.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,19%.

**8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD sebesar Rp. 63.582.000,- dan dapat direalisasi

sebesar Rp. 55.300.400,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 86,97%.

#### **9. Penataan dan Pengelolaan Arsip**

Kegiatan penataan dan pengelolaan arsip sebesar Rp. 14.084.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 14.005.600,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 99,44%.

#### **10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sebesar Rp. 374.073.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 317.231.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 84,80%.

### **III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

#### **1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebesar Rp. 42.081.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 42.081.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 100%.

### **IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

#### **1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.24.850.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 17.935.950,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 72,18%.

### **V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 29.512.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 26.512.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 89,83%.

## **2. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD sebesar Rp. 263.825.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 245.410.600,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 93,02%.

## **3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/ Kegiatan SKPD**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD sebesar Rp. 41.988.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 41.759.665,- atau dengan capaian Kinerja keuangan adalah sebesar 99,46%.

# **VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**

## **1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 333.871.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 312.800.100,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 93,69%.

## **2. Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 71.338.600,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp. 69.219.000,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 97,03%.

## **3. Pengelolaan Mutasi Jabatan**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan sebesar Rp. 175.257.100,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 161.902.400,- atau 92,38%.

## **4. Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN sebesar Rp. 282.653.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 281.009.950,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,42%.

## **5. Pemindahan dan Penempatan PNS**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemindahan dan Penempatan PNS sebesar Rp. 64.899.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 58.425.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 90,02%.

## **6. Pembinaan Jabatan Fungsional PNS**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS sebesar Rp. 33.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 31.481.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,11%.

## **8. Pemetaan Potensi Pegawai**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai adalah sebesar Rp. 160.703.400,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 142.755.600,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88,83%.

## **9. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi sebesar Rp. 254.120.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 253.589.450,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,79%.

## **10. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Aparatur**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PNS sebesar Rp. 120.238.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 118.685.400,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,71%.

## **11. Bimbingan Teknis Kepegawaian**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kepegawaian sebesar Rp. 72.629.750,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 70.374.100,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,89%.

## **12. Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II PNS**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sebesar Rp. 19.380.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 19.366.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,93%.

## **13. Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp. 96.964.300,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 92.393.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,29%.

## **14. Pembekalan PNS Purna Tugas**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembekalan PNS Purna Tugas adalah sebesar Rp. 64.527.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 63.815.700,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,90%.

**15. Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebesar Rp. 61.333.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 60.943.800,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,37%.

**16. Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur sebesar Rp. 523.8840.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 501.779.506,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,78%.

**17. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebesar Rp. 97.616.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 87.886.900,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 90,03%.

**19. Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pengelolaan Dokumen/Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian sebesar Rp. 68.939.750,- terealisasi sebesar Rp. 64.590.750,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 93,69%.

**19. Fasilitas Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai sebesar Rp. 44.580.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 43.307.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,14%.

**20. Pengelolaan SK CPNS, PNS dan Honorer Pemprov. Sumatera Barat**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 54.320.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 50.138.400,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 92,30%.

**21. Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Base kepegawaian daerah**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Base Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 145.341.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 143.385.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,65%.

## **22. Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov. Sumbar**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov. Sumbar Tahun 2016 sebesar Rp. 85.637.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 82.810.501,- atau capaian keuangan sebesar 96,70%.

## **23. Rapat Koordinasi Kepegawaian**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian sebesar Rp. 70.791.350,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 68.521.240,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,79%.

## **24. Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp. 29.850.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 29.820.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,90%.

## **25. Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) sebesar Rp. 42.521.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 41.771.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,24%.

## **26. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebesar Rp. 41.923.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 41.814.200,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,74%.

## **27. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG)**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG) sebesar Rp. 153.613.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 149.105.800,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 97,07%.

#### **IV. PENUTUP**

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan target yang direncanakan. Demikian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ini disusun agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Desember 2016  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**JAYADISMAN, SH, M.Kn**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571227 198303 1 006